

MENGULAS IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA TERKINI

HENDRIZAL, S.IP., M.Pd.

Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

E-mail: hendrizarisipmpd@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud mengulas dan menjelaskan tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Hal ini dengan tujuan memberi wawasan kepada warga bangsa untuk semakin memahami hal-hal berikut: identitas nasional sebagai karakter bangsa; sumber identitas nasional bangsa Indonesia; dan kondisi identitas nasional bangsa Indonesia. Diketahui bahwa identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat oleh wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistem hukum/perundang-undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Pada tataran praksisnya, selanjutnya, diharapkan agar para warga bangsa dapat menerapkan pemahaman tentang identitas nasional bangsa Indonesia dan implementasinya dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disarankan agar kita semakin peduli untuk mengetahui dan mempelajari tentang identitas nasional bangsa Indonesia, sehingga dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan. Tulisan ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan para warga bangsa dalam memahami masalah identitas nasional bangsa Indonesia dan implementasinya di zaman sekarang yang berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan.

Kata kunci: identitas nasional, bangsa Indonesia, implementasi.

A. PENDAHULUAN

Identitas secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian itu maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis.

Berdasarkan hakikat identitas nasional itu, identitas suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati bangsa tersebut atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan identitas atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya,

sehingga mempunyai persamaan waktu atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami wilayah tertentu.

Para tokoh besar ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hakikat kepribadian tersebut berasal dari beberapa disiplin ilmu, antara lain antropologi, psikologi dan sosiologi. Tokoh antropologi Ralph Linton bersama pakar psikologi Abraham Kardiner mengadakan suatu proyek penelitian tentang watak umum suatu bangsa, dan sebagai objek penelitiannya adalah bangsa Maqueseas dan Tanala, yang kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam buku berjudul *The Individual and His Society* (1938). Dari hasil penelitiannya tersebut dirumuskan sebuah konsepsi tentang *basic personality structure*. Konsepsi itu dimaksudkan bahwa semua unsur watak yang sama dimiliki oleh sebagian besar warga suatu masyarakat. Unsur watak yang sama ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang sama yang telah dialami oleh warga masyarakat tersebut, karena mereka hidup di bawah pengaruh lingkungan budaya selama tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

Linton juga mengemukakan pengertian tentang *status personality*, yaitu watak individu yang ditentukan oleh statusnya yang didapatkan dari kelahiran maupun dari segala daya upaya. *Status personality* seseorang mengalami perubahan dalam suatu saat jika seseorang tersebut bertindak dalam kedudukannya yang berbeda-beda, misalnya sebagai ayah, sebagai anak laki-laki, sebagai pegawai, sebagai pedagang dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas maka pengertian kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian "*peoples character*", "*national character*" atau "*national identity*". Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia tidak bisa diketahui jika hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Hal ini mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta yang sejak asalnya memiliki perbedaan. Kepribadian bangsa Indo-

nesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun demikian identitas nasional suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis. Ini karena mengingat bangsa merupakan kumpulan-kumpulan manusia yang suka berinteraksi dengan bangsa di dunia dengan segala hasil budayanya. Oleh karena itu identitas nasional suatu bangsa, termasuk identitas nasional Indonesia, juga harus dipahami dalam suatu konteks dinamis. Maksudnya adalah bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam pembangunan, termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Apalagi di era revolusi industri 4.0 sekarang, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan keleluasaan akses digital serta informasi lewat internet, membuat orang semakin bebas berinteraksi secara global melalui media sosial, sehingga hal itu juga mendorong banyak perkembangan identitas nasional suatu bangsa.

Pada era sebelumnya, sebagaimana kita ketahui, di dunia internasional bangsa-bangsa besar yang telah mengembangkan identitasnya secara dina-

mis membawa nama bangsa tersebut baik dalam kekhasan dunia ilmu pengetahuan maupun dalam khasanah dunia pergaulan antarbangsa di dunia. Kebesaran bangsa Inggris tidak terlepas dari jerih payah serta kreativitas bangsa tersebut dalam melakukan akselerasi dalam pembangunannya. Dalam sejarah dunia diketahui bahwa banyak anak-anak bangsa Inggris menemukan ilmu pengetahuan, yang kemudian dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Atas karya itulah bangsa Inggris mengalami suatu revolusi kehidupan yaitu Revolusi Industri. Dengan revolusi itulah bangsa Inggris menjelajahi benua lain, sehingga di berbagai benua yang ada bangsa Inggris menamakan karya besarnya yang dikembangkan karena kreativitas dari bangsa tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

Menyimak uraian pembukaan di atas, muncul pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah identitas nasional sebagai karakter bangsa? *Kedua*, bagaimanakah sumber identitas nasional bangsa Indonesia? *Ketiga*, bagaimanakah kondisi identitas nasional bangsa Indonesia?

Dengan menguak jawaban atas masalah di atas, diharapkan tulisan ini dapat memberi wawasan kepada warga bangsa untuk semakin memahami hal-hal berikut: identitas nasional sebagai karakter bangsa; sumber identitas nasional bangsa Indonesia; dan kondisi identitas nasional bangsa Indonesia. Pada tataran praksisnya, selanjutnya, diharapkan agar para warga bangsa dapat menerapkan pemahaman tentang identitas nasional bangsa Indonesia dan implementasinya dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian tujuan pembuatan tulisan ini adalah agar dapat dijadikan sebagai penambah wawasan para warga bangsa dalam memahami masalah identitas nasional bangsa Indonesia dan implementasinya di zaman sekarang yang berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan.

C. METODE

Metode yang dipakai untuk tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dan studi literatur. Pada hakikatnya, penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang terjadi saat ini. Artinya, penelitian ini mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan perkataan lain, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan yang ada. Sementara metode literatur ialah metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengambil data-data yang diperlukan dari literatur-literatur yang berkaitan.

Dengan memakai metode di atas, maka secara berurutan dalam bagian berikut dibahas terlebih dahulu identitas nasional sebagai karakter bangsa, yang kemudian diikuti dengan pembahasan sumber identitas nasional bangsa Indonesia dan kondisi identitas nasional bangsa Indonesia.

D. IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI KARAKTER BANGSA

Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata

nation yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosiokultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan dan ideologi bersama.

Identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Identitas nasional tersebut dimulai dari identitas manusia, dan diakhiri dengan integrasi nasional.

1. Identitas Manusia

Manusia merupakan makhluk yang multidimensional, paradoksal dan monopluralistik. Keadaan manusia yang multidimensional, paradoksal dan sekaligus monopluralistik tersebut akan mempengaruhi eksistensinya. Eksistensi manusia selain dipengaruhi keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya atau pedoman hidupnya. Pada akhirnya yang menentukan identitas manusia baik secara individu maupun kolektif adalah perpaduan antara keunikan-keunikan yang ada pada dirinya dengan implementasi nilai-nilai yang dianutnya.

2. Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia bersifat pluralistik (ada keanekaragaman)

baik menyangkut sosiokultural ataupun religiusitas. Rinciannya adalah:

- Identitas fundamental/ideal yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa.
- Identitas instrumental yaitu identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa UUD 1945, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan.
- Identitas religiusitas yaitu Indonesia yang pluralistik dalam agama dan kepercayaan.
- Identitas sosiokultural yaitu Indonesia yang pluralistik dalam suku dan budaya.
- Identitas alamiah yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

3. Integrasi Nasional

Menurut Mahfud MD (1993:71), integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat yang menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, yang secara sederhana memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.

Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya.

Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan kenyataan objektif tersebut maka untuk jati diri bangsa Indonesia serta identitas nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan akar-akar budaya yang mendasari identitas nasional Indonesia. Kepribadian, jati diri, serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sejak zaman Kutai, Sriwijaya, Majapahit serta kerajaan lainnya sebelum penjajahan bangsa asing di Indonesia.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan serta keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara (Azwar Ananda dan Bambang Trisno, 2019). Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui suatu proses yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-4, ke-5, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya Kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Proses terbentuknya nasionalisme pada budaya ini menurut Mohammad Yamin diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar identitas nasionalisme Indonesia.

E. SUMBER IDENTITAS NASIONAL BANGSA INDONESIA

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas yaitu: (1) Faktor objektif, yang meliputi faktor

geografis, ekologis dan demografis. (2) Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa (Joko Suryo, 2002).

1. Dasar Negara

Pancasila bukan muncul secara tiba-tiba yang dipaksakan oleh suatu rezim melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Pancasila sebelum dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah bangsa Indonesia sendiri. Dalam pengertian seperti ini, menurut Notonagoro (1988), bangsa Indonesia adalah sebagai *kausa matrealis* Pancasila. Nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Dasar negara yang merupakan lambang yang menyatukan bangsa Indonesia, yang beragam-ragam, merupakan kesepakatan bersama yang menyatukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dasar yang melandasi negara adalah

merupakan identitas nasional. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki landasan fundamental yaitu Pancasila yang merupakan tujuan dan pedoman dalam berbangsa dan bertanah air di Indonesia, serta kunci dasar pemersatu bangsa Indonesia.

Landasan fundamental ini merupakan nilai-nilai dasar kehidupan bagi bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia merupakan negara demokrasi yang dalam pemerintahannya menganut sistem presidensiil, dan Pancasila ini merupakan jiwa dari demokrasi. Demokrasi yang didasarkan atas lima dasar tersebut dinamakan Demokrasi Pancasila. Dasar negara ini dinyatakan oleh Presiden Soekarno (Presiden Indonesia yang pertama) dalam Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan, bangsa Indonesia memiliki dasar instrumental berupa UUD 1945, Burung Garuda sebagai lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan.

2. Wilayah dan Kondisi Geografis

Dalam kemerdekaannya bangsa Indonesia menyatakan bahwa wilayah

negara kesatuan ini meliputi segenap wilayah bekas jajahan pemerintah kolonial Belanda. Wilayah yang terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania diakui kedaulatannya oleh Belanda sendiri dan dunia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka, berdaulat dan bersatu.

3. Politik Indonesia

Indonesia adalah negara Demokrasi Pancasila. Segala sesuatu di Indonesia diatur dan dimusyawarahkan secara mufakat, hikmat dan kebijaksanaan. Perpolitikan di Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

4. Ideologi dan Agama

Seperti diatur dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama di dalam kehidupan warga negara Indonesia. Masing-masing warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga negara Indonesia. Hak dalam hidup ber-

agama di Indonesia dilindungi oleh negara.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari agama-agama di atas, agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Dalam Islam terdapat banyak golongan dan kelompok pemahaman misalnya kelompok Islam santri untuk menunjukkan keislaman yang kuat dan Islam abangan atau Islam nominal bagi beberapa masyarakat Islam di Jawa. Sedangkan di kalangan kelompok santri sendiri perbedaan pemahaman dan pengamalan Islam dikenal dengan kelompok modernis atau tradisional. Kelompok pertama lebih berorientasi pada pencarian tafsir baru atau ijtihad atas wahyu Allah. Sedangkan kelompok tradisional lebih menyadarkan pengamalan agamanya pada pendapat-pendapat ulama (Kuntowijoyo, 1997).

Karena Indonesia merupakan negara yang multiagama, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa. Banyak kasus disintegrasi bangsa yang terjadi akhir-akhir ini melibatkan agama

sebagai faktor penyebabnya. Misalnya, Ambon yang sering kali diisukan sebagai pertikaian antara dua kelompok agama, meskipun isu ini belum tentu benar. Tetapi isu agama adalah salah satu isu yang mudah menciptakan konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi resiko konflik antaragama, perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antara agama-agama yang ada (Franz Magnis-Suseno, 1995:174). Menghormati berarti mengakui secara positif dalam agama dan kepercayaan orang lain, juga mampu belajar satu sama lain. Sikap saling menghormati dan menghargai memungkinkan penganut agama-agama yang berbeda bersama-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang diterima manusia dari Tuhan.

5. Ekonomi

Perekonomian bangsa Indonesia seperti diatur dalam UUD 1945 adalah ekonomi yang bersifat kerakyatan. Kekayaan alam dan segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya digunakan demi menyejahterakan seluruh penduduk Indonesia. Dalam perekonomian negara Indonesia terdapat tiga bentuk badan usaha yaitu

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi.

Jadi, bangsa Indonesia memiliki asas perekonomian untuk kekayaan alam dan menyangkut hidup orang banyak diatur oleh negara, sedangkan bidang lainnya dijalankan oleh swasta dan koperasi.

6. Pertahanan Keamanan

Ciri khas dari bangsa Indonesia dalam bidang ini bahwa pertahanan di Indonesia adalah pertahanan rakyat semesta atau dikenal Hankamrata (Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta). Pertahanan di Indonesia bersifat menyeluruh bagi masyarakat Indonesia. Apabila salah satu wilayah Indonesia diserang, maka seluruh masyarakat di Indonesialah yang akan mengamankan dan mempertahankannya.

7. Demografi

Penduduk Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu, sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih

spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya dan adat istiadat.

Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus, yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin (Fredric Barth, 1988). Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa. Populasi penduduk Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 265 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya terdiri dari etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa seperti suku Makassar-Bugis (3,68%), Batak (2,04%), Bali (1,88%), Aceh (1,4%), dan suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenali dari mana asalnya. Etnis Tionghoa hanya berjumlah 2,8% dari populasi Indonesia, tetapi mereka menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia (James Danandjaja, 1999). Mayoritas dari mereka bermukim di perkotaan.

8. Kebudayaan

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk petunjuk (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya adalah kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong sebagai ideal atau yang seharusnya (*world view*) maupun yang operasional dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari (*ethos*).

Seperti suku bangsa yang banyak dimiliki Nusantara, demikian pula dengan kebudayaan. Terdapat ratusan kebudayaan Indonesia yang membentuk identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang dilahirkan dengan kemandirian identitasnya.

9. Bahasa

Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan

digunakan sebagai sarana berinteraksi antarmanusia. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis.

Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan sebutan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung berbagai etnis yang mendiami kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa komunikasi di antara suku-suku di Nusantara, bahasa Melayu juga menempati posisi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan kepulauan Nusantara yang dipergunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing.

Pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, melalui peristiwa Sumpah Pemuda Indonesia, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

F. KONDISI IDENTITAS BANGSA INDONESIA

1. Dalam Perekonomian

Kekayaan alam saat ini banyak yang dikelola oleh asing. Pengelolaan

ini memberikan keuntungan yang sangat kecil sekali bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya di bidang pertambangan, bahkan lahan perkebunan pun telah mulai sedikit demi sedikit dikuasai oleh negara lain. Beberapa bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air minum tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh negara. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun pengelolaannya mayoritas dikuasai oleh asing.

Pola hidup masyarakat atau bangsa Indonesia saat ini merupakan pola kehidupan yang mengagungkan produk asing. Masyarakat Indonesia saat ini lebih senang apabila produk yang dikonsumsi merupakan buatan luar negeri.

2. Dalam Kebudayaan

Beberapa budaya, lagu dan tarian telah dicaplok oleh bangsa lain. Kebudayaan batik telah dipatenkan oleh Malaysia sebagai produk budayanya. Lagu, tarian, seni musik, bahkan makanan khas bangsa Indonesia banyak yang dicaplok begitu saja oleh bangsa lain. Selain itu, pola kehidupan generasi muda bangsa Indonesia saat ini telah luntur dan bersifat kebarat-baratan.

Tidak ada rasa kebanggaan lagi dalam penggunaan bahasa Indonesia,

bertata krama Indonesia. Kehidupan dan kebudayaan yang berbau kebarat-baratan dianggap lebih tinggi statusnya dan lebih modern.

3. Dalam Nasionalisme

Kata “identitas” yang berasal dari bahasa Inggris *identity* sebetulnya memiliki pengertian harfiah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Himpunan kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan istilah identitas bangsa atau identitas nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Kata “nasional” sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme sebagaimana akan dijelaskan kemudian.

Nasionalisme merupakan sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung

kepada negara-bangsa atas nama sebuah bangsa. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan. Dalam perkembangan selanjutnya, para pengikut nasionalisme ini berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut dengan sebuah bangsa (*nation*). Dengan demikian bangsa atau *nation* merupakan suatu badan atau wadah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk menentukan tujuan bersama. Tujuan bersama ini direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas populasi, geografis,

dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau *state*.

Gabungan dari dua ide tentang bangsa (*nation*) dan negara (*state*) tersebut mewujud dalam sebuah konsep negara-bangsa atau dikenal *nation-state* dengan pengertian yang lebih luas dari sekadar sebuah negara dalam pengertian *state*. Menurut Dean A. Minix dan Sandra M. Hawly (1998), *nation-state* atau negara-bangsa merupakan sebuah bangsa yang memiliki bangunan politik (*political building*) seperti ketentuan-ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri dan sebagainya. Mengacu pada definisi ini, konsep negara-bangsa merupakan pengertian negara dalam maknanya yang modern.

Dari uraian singkat ini, unsur yang tidak bisa dilewatkan dalam pembahasan ini adalah hubungan erat antara nasionalisme dengan warga negara, sebagaimana hal itu terjadi pada konsep-konsep sebelumnya. Seperti dinyatakan Koerniatmanto Soetoprawiro (1996) bahwa secara hukum, peraturan tentang kewarganegaraan merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan paham nasionalisme. Lahirnya negara-bangsa (*nation-state*) merupakan akibat

langsung dari gerakan nasionalisme yang sekaligus telah melahirkan perbedaan pengertian tentang kewarganegaraan dari masa sebelum kemerdekaan.

Paham nasionalisme di Indonesia lahir sejak abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Hal yang patut disayangkan bahwa perdebatan panjang di antara para tokoh pergerakan nasional tentang paham kebangsaan itu berakhir pada saling curiga yang sulit dipertemukan. Mereka sepakat tentang perlunya suatu konsep nasionalisme Indonesia merdeka, tetapi mereka berbeda dalam persoalan nilai atau watak nasionalisme Indonesia.

Secara garis besar terdapat tiga pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham keislaman, Marxisme, dan nasionalisme Indonesia (Alfian, 1978). Sejalan naiknya pamor Soekarno dengan menjadi Presiden pertama RI, kecurigaan di

antara para tokoh pergerakan yang telah tumbuh di saat-saat menjelang kemerdekaan berkembang menjadi pola ketegangan politik yang lebih permanen antara negara melalui figur nasionalis Soekarno di satu sisi dengan para tokoh yang mewakili pemikiran Islam dan Marxisme di sisi lain.

Menurut George Mc.Turman Kahin (1955), Islam yang disebutnya dengan istilah agama Muhammad bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan, melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib (*in group*) menentang penjajahan asing dan penindas yang berasal dari agama lain.

Pandangan senada dikatakan pula oleh Fred R Von der Mehden sebagaimana dikutip Bahtiar Effendi (1998) bahwa Islam merupakan sarana yang paling jelas, baik untuk membangun rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Mehden menegaskan bahwa satu-satunya ikatan universal yang tersedia di luar kekuasaan kolonial adalah Islam.

Ikatan universal Islam tersebut dalam aksi kolektifnya diwakili oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Sarekat Islam (SI) yang berdiri pada

awalnya dengan nama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh pengusaha yang bernama H. Samanhoedi di Solo pada tahun 1911. Sekalipun di bawah simbol Islam, Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Abdoel Moeis, telah menjadi organisasi politik pemula yang menjalankan program politik nasional yang mendapat dukungan dari semua kelompok masyarakat luas baik di kota maupun di pelosok desa-desa. Hal itu disebabkan Sarekat Islam mampu menggelorakan semangat nasional menuntut pemerintahan sendiri oleh rakyat Indonesia dan kemerdekaan sepenuhnya.

Gerakan nasional Sarekat Islam (SI) yang tak mengenal perbedaan kelas, profesi dan tempat tinggal ternyata tidak bisa bertahan lama. Ini akibat sejumlah aktivis dalam Sarekat Islam (SI) tergoda untuk membelokkan kebijakan politik/publik ke arah ideologi Islam. Maka pada penghujung 1920-an popularitas Sarekat Islam (SI) mengalami pasang surut (Kuntowijoyo, 1997). Sekalipun tidak secara formal dinyatakan Islam sebagai ideologi politik Sarekat Islam, namun keinginan eksklusif pada sejumlah tokoh Sarekat Islam turut

menjadi salah satu penyebab kemerosotan Sarekat Islam.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap berkurangnya reputasi Sarekat Islam (SI) adalah masuknya paham Marxisme ke dalam tubuh Sarekat Islam melalui penyusupan yang dilakukan oleh aktivis politik partai beraliran kiri yang berada dalam Asosiasi Demokrasi Sosial Hindia Belanda (*Indische Sosial Democratische Vereeniging* atau ISDV). Penyusupan itu terjadi karena pertimbangan politik dukungan massa yang besar yang pada saat itu hanya dimiliki oleh Sarekat Islam.

Paham Marxisme pada mulanya berkembang di luar gerakan-gerakan kebangsaan pribumi yaitu Partai Nasional Hindia Belanda (NIP, *Nationale Indische Partij*) yang merupakan organisasi politik Eropa-Indonesia yang lahir pada tahun 1912 yang menyerukan paham kesetaraan ras, keadilan sosial-ekonomi dan kemerdekaan, yang didasarkan pada kerjasama Eropa-Indonesia. Seruan-seruan politik nasionalisme NIP mendapatkan respons dari pemerintahan kolonial dengan cara melakukan tindakan-tindakan keras terhadap aktivis organisasi tersebut. Akibat selanjutnya, kelompok minoritas dalam NIP mengga-

bungkan diri dengan partai beraliran kiri ISDV yang didirikan pada tahun 1914 oleh Hendrik Sneevlit, seorang mantan aktivis partai buruh demokrasi liberal di Belanda. Dia datang ke Indonesia setahun sebelum mendirikan partai tersebut. ISDV pada akhirnya menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia yang sepenuhnya beraliran komunis yang dilahirkan oleh dua aktivis SI Cabang Semarang yakni Semaun dan Darsono.

Dalam perkembangan selanjutnya, Soekarno yang dikenal sebagai murid tokoh SI Tjokroaminoto, mendirikan organisasi politik sendiri yang mengembangkan paham ideologi politik yang berbeda dari ideologi pergerakan sebelumnya. Organisasi politik itu kemudian didirikan pada tahun 1927 dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan tujuan seperti organisasi-organisasi sejenis lainnya yakni menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, baik ekonomi maupun politik, dengan pemerintahan yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Didasari oleh semangat persatuan seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan tersebut, PNI di bawah kepemimpinan Soekarno membangun

semangat nasionalisnya kepada paham ideologi kebangsaan (nasionalisme).

Sekalipun Soekarno seorang Muslim, ia tidak sekali-kali mendasari perjuangan partainya dengan ideologi Islam. Menurutnya, kebijakan ini merupakan pilihan terbaik bagi kemerdekaan maupun masa depan rakyat Indonesia yang Kristen maupun yang beragama Islam. Gagasan dan semangat nasionalisme PNI mendapatkan respons dan dukungan luas dari kalangan intelektual muda didikan Barat lainnya seperti Syahrir dan Mohammad Hatta.

Menjelang kemerdekaan, gerakan nasionalis yang dimotori oleh Soekarno berhadapan dengan kekuatan politik Islam dalam konteks hubungan agama (Islam) dan negara dalam sebuah negara Indonesia merdeka. Bahkan menurut Bahtiar Effendi (1998), kadar konfrontasi antara kelompok nasionalis dengan aktivis Islam jauh lebih besar dibandingkan dengan konfrontasi yang pernah terjadi dalam tubuh SI antara kubu Islam dan Marxisme. Pada fase selanjutnya, dua golongan inilah, yakni kelompok nasionalis dan kelompok Islam, yang mendominasi perdebatan panjang menjelang kemerdekaan dan sesudah-

nya tentang watak nasionalisme Indonesia.

Konsep nasionalisme Soekarno mendapat kritikan dari kalangan Islam. Tokoh Islam, Muhammad Natsir (1954, 1973, 2004), mengkhawatirkan paham nasionalisme Soekarno dapat berkembang menjadi sikap fanatisme buta kepada Tanah Air. Bagi umat Islam, hal itu akan berakibat pada terputusnya tali persaudaraan internasional umat Islam (*ukhuwwah islamiyah*) dari saudara-saudara seimannya di negara-negara lainnya. Untuk menghindarkan kekhawatiran ini, menurut Natsir, nasionalisme harus didasarkan kepada niat suci yang bersifat Ilahiah yang melampaui hal-hal yang bersifat material. Dari pandangan inilah nasional Indonesia harus bercorak islami. Lebih dari alasan sosiologis, Natsir menandakan gagasannya dengan argumentasi historis bahwa Islamlah yang menjadi pembuka jalan medan politik kemerdekaan dan sebagai penanaman awal bibit persatuan Indonesia yang menyingkirkan sifat-sifat kepulauan dan keprovinsian, sebagaimana pernah disimpulkan oleh kebanyakan pengamat sejarah nasionalisme Indonesia.

Menghadapi kritikan itu, Soekarno membantah tuduhan dari kalangan

Islam terhadap gagasan nasionalismenya. Menurutnya, nasionalisme yang disuarakannya bukanlah nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat, atau berwatak chauvinisme. Menurutnya, nasionalisme yang dikembangkan bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropa. Selain mengungkapkan keyakinan watak nasionalisme yang penuh nilai-nilai kemanusiaan, Soekarno juga meyakinkan pihak-pihak yang berseberangan pandangan bahwa kelompok nasional dapat bekerja sama dengan kelompok manapun baik golongan Islam maupun Marxis.

Konsep nasionalisme yang dirumuskan para *founding father* berkelindan dengan konsep-konsep lanjutan lainnya, seperti konsep negara-bangsa yang lebih dikonkretkan menjadi bentuk dan struktur negara Indonesia yang berbentuk republik. Nasionalisme Indonesia pada dasarnya berwatak inklusif dan berwawasan kemanusiaan. Pada perkembangan selanjutnya, watak nasionalisme Indonesia yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh nasionalis mempengaruhi konsep pokok selanjutnya tentang negara-bangsa, warga negara dan dasar

negara Indonesia atau yang kemudian disebut dengan ideologi Pancasila. Konsep-konsep itu dirumuskan dalam ketetapan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, konsep negara-bangsa. Konsep negara-bangsa (*nation-state*) adalah konsep tentang negara modern. Suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan, harus ada pula penduduk yang merupakan modal sebuah bangsa (*nation*) sebelum menjadi sebuah negara. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara-bangsa maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Sebagai sebuah negara-bangsa, ketiga faktor tersebut sudah dimiliki oleh negara Indonesia.

Menurut UUD 1945 Pasal 1 bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Indonesia yaitu suatu bentuk pemerintahan yang bersifat antitesis monarki dengan kepala pemerintahan bukan seorang raja dengan sistem pemilihan umum untuk menduduki jabatan politiknya. Selain pasal tentang bentuk dan kedaulatan negara, konstitusi UUD 1945 memuat juga pasal-pasal tentang unsur-unsur kelengkapan negara Indo-

nesia lainnya seperti badan legislatif, eksekutif, yudikatif, pemerintahan daerah dan lainnya.

Kedua, konsep warga negara. Menurut Bab X UUD 1945 Pasal 26 bahwa yang juga menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sejalan dengan tuntutan zaman, bunyi pasal ini telah mengalami perubahan (amandemen) melalui perubahan kedua UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000. Menurut amandemen kedua ini bunyi Bab X UUD 1945 Pasal 26 adalah “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Ketiga, konsep dasar negara Pancasila. Sehari setelah Indonesia merdeka, terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan panjang di BPUPKI yang terjadi sebelum kemerdekaan tentang dasar negara antara kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perdebatan tersebut akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni BPUPKI “bersepakat” menghasilkan sebuah *preambul*. Dalam

preambul itu terdapat kalimat: “....kemerdekaan Indonesia dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at bagi pemeluk-pemeluknya....” Mereka juga “menerima” Islam sebagai agama negara dan presiden Republik Indonesia harus seorang yang berasal dari umat Islam. Kemudian, pada 22 Juni 1945 kesepakatan itu ditandatangani bertepatan dengan hari jadi Kota Jakarta.

Sehari setelah kemerdekaan, kesepakatan itu mulai dipersoalkan. Diceritakan bahwa orang-orang Kristen yang sebagian besar berada di wilayah timur Indonesia menyatakan tidak bersedia bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta dihapuskan. Unsur-unsur Islam dalam Piagam Jakarta itu adalah 7 kata dalam “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, Islam sebagai agama negara, dan persyaratan bahwa presiden harus seorang Muslim.

Keinginan masyarakat wilayah timur Nusantara memaksa para perumus dasar negara kembali melakukan tugas yang melelahkan dalam rangka meru-

muskan kembali dasar ideologi dan konstitusi negara. Akhirnya kelompok Islam bersepakat untuk menghapus unsur-unsur Islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sebagai gantinya, unsur ketauhidan dimasukkan ke dalam sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sejak diterimanya usul perubahan tersebut dan ditetapkannya UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dengan sendirinya 7 kata klausul islami dalam Piagam Jakarta hilang dari konstitusi negara. Hilangnya 7 kata dari Piagam Jakarta dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dinilai oleh sebagian besar umat Islam sebagai sebuah pengorbanan besar umat Islam demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia. Sejak peristiwa ini, dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dengan kelima silanya, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

G. PENUTUP

Berdasarkan uraian bagian terdahulu, dapat diambil kesimpulan bahwa identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat oleh wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistem hukum/perundang-undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.

Hakikat bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah sebagai suatu “kesatuan nasional”. Hakikat negara merupakan suatu wilayah di mana terdapat sekelompok manusia melakukan kegiatan pemerintahan. Bangsa dan negara Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan nasib sejarah dan melakukan tugas pemerintahan dalam suatu wilayah “Indonesia”.

Dalam nuansa identitas nasional Indonesia tersebut perlu diperkuat integrasi nasional dengan strategi yang mantap. Hal ini perlu terus dilakukan

agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu karena pada hakikatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kesatuan dan persatuan bangsa yang diinginkan (Mahfud MD, 1993:70). Pada akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang makmur, aman dan tenteram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon, Kalimantan Barat, dan Papua, hal itu merupakan cermin dari belum terwujudnya integrasi nasional yang diharapkan selama ini. Kalau konflik tersebut terus dibiarkan, hal itu bisa mengancam identitas nasional Indonesia sebagai suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1978. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ananda, Azwar dan Bambang Trisno. 2019. *Menelusuri Pancasila*. Editor dan Penyunting Hendrizal. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Barth, Fredric. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.
- Danandjaja, James. 1999. "Integrasi Suku-suku Bangsa di Indonesia pada Umumnya dan Suku Bangsa Tionghoa pada Khususnya." *Makalah*.
- Dashefsky, Arnold. 1975. "Ethnic Identity in Society." From Driedger, Leo. 1989. *The Ethnic Factor: Identity in Diversity*. Toronto: McGraw-Hill Ryerson, pp. 136-137.
- Driedger, Leo. 1989. *The Ethnic Factor: Identity in Diversity*. Toronto: McGraw-Hill Ryerson.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Ghee, Lim Teck dan Alberto G. Gomes. 1993. *Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hendrizal. 2011. *Pembelajaran PKN Berbasis Otonomi Daerah: Sebuah Studi Kasus*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Hendrizal. 2016. "Urgensi Pendidikan Moral sebagai Pembentuk Warga Negara yang Baik". *Jurnal PPKn & Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2016, halaman 18-35, ISSN: 1907-5901, terbitan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Riau (Unri), Pekanbaru; URL: <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/issue/view/437>.
- Hendrizal. 2017. "Urgensi Model Pembelajaran *Jurisprudential Inquiry* dalam Keberagaman Bangsa Indonesia". *Jurnal PPKn & Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2017, halaman 66-82, ISSN: 1907-5901, terbitan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Riau (Unri), Pekanbaru; URL: <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/4692/4454>.

- Hendrizal. 2020. *Kajian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Kahin, George Mc.Turman. 1955. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Linton, Ralph. 1938. "Culture, Society, and the Individual." *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 33(4), 425–436. <https://doi.org/10.1037/h0057093>.
- Magnis-Suseno, Franz. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Minix, Dean A. and Sandra M. Hawley. 1998. *Management of Relations between States and Other Actors*. Belmont, CA: West/Wadsworth.
- Natsir, Mohammad. 1954. *Capita Selecta Jilid 1*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Natsir, Mohammad. 1973. *Persatuan Agama dan Negara: Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Natsir, Mohammad. 2004. *Islam sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Segi Arsy.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notonagoro. 1988. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Notonagoro. T.t. *Pancasila Dasar Filosofat Negara RI I II III*.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ristekdikti.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila: Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Schermerhorn, R.A. 1979. *Comparative Ethnic Relations*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sinal, Mohamad. 2017. *Pancasila Konsensus Negara-Bangsa Indonesia*. Malang: Madani.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan, Parsudi. 1999. "Hubungan Antarsuku Bangsa." Bahan Kuliah Hubungan Antarsuku Bangsa.
- Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Suryo, Joko. 2002. "Pembentukan Identitas Nasional." Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education. Yogyakarta: LP3 UMY.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2017. *Paradigma Terbaru Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. 2017. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

✉hz